



Rencana Kerja (Renja)

2024

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kami Panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (renja) Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024.

Renja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Rencana Strategis Sekretariat DPRd Kota Pontianak Tahun 2024-2026, dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2024 di Sekretariat DPRD Kota Pontianak. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada tahun 2024

Kami berharap Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Pontianak serta mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah dan pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak, sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	(i)
DAFTAR ISI	(ii)
DAFTAR TABEL	(iii)
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-21
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-41
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-2
3.3 Program dan kegiatan.....	III-2
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	IV-1
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	IV-1
BAB V : PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pontianak s.d Desember 2022	II-1
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 KotaPontianak	II-12
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Pontianak....	II-22
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Pontianak.....	II-26
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pontianak.....	II-42
Tabel 3.1	Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pontianak.....	III-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan mengacu pada Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 serta Surat Edaran Wali Kota Pontianak nomor 050/10/BAPPEDA tahun 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, maka Perangkat Daerah Wajib membuat Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Kerja dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kota Pontianak ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Sekretariat DPRD Kota Pontianak saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kota Pontianak dan stakeholder lainnya yang berada di kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan dan peran strategis. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan dengan memperhatikan kepentingan pelayanan anggota DPRD dan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penanganan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 129).
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 32 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 32).

- 27. Peraturan Walikota Pontianak Nomor tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor).
- 28. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 43).
- 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja PD dengan renstra PD serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan pemerintahan berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
BAB V	DAERAH
	PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Dearah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tahun) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Terkait dengan Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Ketersediaan Dokumen Perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan/ subkegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2023. Pada tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Pontianak melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBDP sejumlah Rp. 57.102.944.828,- (*Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Juta Sembulan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan per Desember dengan realisasi anggaran Rp. 55.111.956.764 (*Lima Puluh Lima Milyar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) sebesar 96,51% Secara detail pelaksanaan untuk program-program Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2022 dapat diberikan gambaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD Kota Pontianak s.d Desember 2022

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
				5		6	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik		Sangat Baik	
1		4.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	8.683.398.767	92,11 %	8.272.003.209
1.1		4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	18.381.000	9 dokumen	18.346.000
1.1.1		4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	4.999.100	2 dokumen	4.999.100
1.1.2		4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	4 dokumen	5.757.900	4 dokumen	5.722.900
1.1.3		4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	7.624.000	3 dokumen	7.624.000

1	2	3	4	5			6		
				K		Rp	K		Rp
1.2		4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12	bulan	5.489.336.722	12	bulan	5.335.391.943
1.2.1		4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	5.023.158.122	12	bulan	4.882.113.343
1.2.2		4.02.01.2.02.01.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	bulan	47.000.000	12	bulan	40.950.000
1.2.3		4.02.01.2.02.01.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	bulan	417.800.000	12	bulan	410.950.000
1.2.4		4.02.01.2.02.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	2	dokumen	1.378.600	2	dokumen	1.378.600
1.3		4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4	unit	35.792.000	4	unit	27.573.500
1.3.1		4.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah SKPD yang diasuransikan	4	unit	35.792.000	4	unit	27.573.500
1.4		4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	36	orang	328.972.000	36	orang	214.968.000
1.4.1		4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	78	stel	48.400.000	73	stel	45.000.000
1.4.2		4.02.01.2.05.02 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal	36	orang	280.572.000	33	orang	169.968.000

1	2	3	4	5		6	
				K	Rp	K	Rp
1.5		4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	bulan	2.284.921.785	2.278.198.766
1.5.1		4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12	bulan	80.546.185	80.540.200
1.5.2		4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	243.246.400	242.182.750
1.5.3		4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan	107.132.740	107.130.891
1.5.4		4.02.01.2.06.04 Penyediaan bahan logistik kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12	bulan	999.338.960	999.179.350
1.5.5		4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	218.897.500	217.897.000
1.5.6		4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	76.000.000	75.810.000
1.5.7		4.02.01.2.06.08 Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	943	orang	149.460.000	149.277.750
1.5.8		4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12	bulan	410.300.000	406.180.825

1	2	3	4	5		6	
				K	Rp	K	Rp
1.6		4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	49	unit	525.995.260	52 unit 397.525.000
1.6.1		4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	17	unit	74.802.250	14 unit 65.750.000
1.6.2		4.02.01.2.07.11 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	38	unit	451.193.010	38 unit 331.775.000
1.7		4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	bulan	2.554.027.094	12 bulan 2.406.016.579
1.7.1		4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12	bulan	496.498.984	12 bulan 455.889.452
1.7.2		4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	281.177.310	12 bulan 247.608.127
1.7.3		4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	bulan	1.776.350.800	12 bulan 1.702.519.000
1.8		4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	295	unit	1.278.431.275	426 unit 1.214.862.676
1.8.1		4.02.01.2.09.01 Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	5	unit	193.750.000	5 unit 193.693.666

1	2	3	4	5		6	
				K	Rp	K	Rp
1.8.2		4.02.01.2.09.02 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				
				3	unit	3	71.263.860
1.8.3		4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara				
				48	unit	80	49.000.000
1.8.4		4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				
				237	unit	336	278.213.650
1.8.5		4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				
				2	unit	2	622.691.500
1.9		4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jangka waktu penyediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	12	bulan	12	28.550.784.012
1.9.1		4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan DPRD				
				12	bulan	12	28.228.134.012
1.9.2		4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD				
				270	stel	270	322.650.000
1.9.3		4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Chek up	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti medical check up				
				0	orang	0	-
1.10		4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Jangka waktu penyediaan layanan administrasi DPRD	12	bulan	12	503.428.525
1.10.1		4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jangka waktu penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD				
				12	bulan	12	503.428.525

1	2	3	4	5		6	
				K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya kualitas layanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD		Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Baik		Sangat baik	
2		4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1.Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 2.Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 % 100 %	15.349.693.900	94,35 % 99,17 %	14.164.861.763
2.1		4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	553.560.500	88 %	542.184.500
2.1.1		4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen program pembentukan peraturan daerah	1 dokumen	3.653.900	1 dokumen	3.653.900
2.1.2		4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Jumlah rancangan perda yang dibahas	10 raperda	155.664.200	8 raperda	154.889.100
2.1.3		4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah rancangan perda yang dikaji	5 raperda	74.335.000	3 raperda	63.735.000
2.1.4		4.02.02.2.01.04 Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan /atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik yang disusun	3 dokumen	313.820.000	3 dokumen	313.819.100
2.1.5		4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang dievaluasi	1 dokumen	6.087.400	1 dokumen	6.087.400

1	2	3	4	5		6			
				K	Rp	K	Rp		
2.2		4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	5	dokumen	104.435.000	5	dokumen	88.385.000
2.2.1		4.02.02.2.02.01 pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	1	dokumen	3.325.000	1	dokumen	3.325.000
2.2.2		4.02.02.2.02.02 pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahanPPAS	1	dokumen	3.325.000	1	dokumen	3.325.000
2.2.3		4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah dokumen APBD	1	dokumen	91.135.000	1	dokumen	75.085.000
2.2.4		4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen APBD Perubahan	1	dokumen	3.325.000	1	dokumen	3.325.000
2.2.5		4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD	1	dokumen	3.325.000	1	dokumen	3.325.000
2.3		4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100	%	65.504.000	89,72	%	65.504.000
2.3.1		4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rapat komisi I	60	kali	13.280.000	48	kali	13.280.000
2.3.2		4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rapat komisi II	60	kali	12.780.000	66	kali	12.780.000

1	2	3	4	5			6		
				K		Rp	K		Rp
2.3.3.		4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat komisi IV						
		60		kali	12.380.000	85	kali	12.380.000	
2.3.4		4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah rapat Komisi III						
		60		kali	14.280.000	37	kali	14.280.000	
2.3.5		4.02.02.2.03.06 Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan	Jumlah rapat pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI						
		1		kali	3.325.000	1	kali	3.325.000	
2.3.6		4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah	Jumlah rapat Pansus LKPJ yang dilaksanakan						
		20		kali	9.459.000	9	kali	9.459.000	
2.4		4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	100	%	3.151.216.400	100	%	2.829.965.552
2.4.1		4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah kegiatan bimbingan teknis DPRD						
		6		kegiatan	2.395.288.000	6	kegiatan	2.159.350.502	
2.4.2		4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jangka waktu fasilitasi publikasi dan dokumentasi dewan						
		12		bulan	437.007.400	12	bulan	364.964.050	
2.4.3		4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan						
		7		orang	234.000.000	7	orang	234.000.000	
2.4.4		4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja DPRD						
		1		dokumen	84.921.000	1	dokumen	71.651.000	

1	2	3	4	5		6			
				K	Rp	K	Rp		
2.5		4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi	100	%	6.360.428.000	100	%	6.303.439.200
2.5.1		4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD	1	dokumen	3.325.000	1	dokumen	3.325.000
2.5.2		4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses	3	kegiatan	6.357.103.000	3	kegiatan	6.300.114.200
2.6		4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan kode etik	100	%	8.229.600	117	%	8.229.600
2.6.1		4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPRD yang dievaluasi	1	dokumen	5.896.000	1	dokumen	5.896.000
2.6.2		4.02.02.2.06.02 Pengawasan kode etik DPRD	Jumlah rapat badan kehormatan yang difasilitasi	12	kali	2.333.600	16	kali	2.333.600
2.7		4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas DPRD yang difasilitasi	100	%	5.106.320.400	98,96	%	4.327.153.911
2.7.1		4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi	24	kegiatan	4.382.154.400	25	kegiatan	3.698.588.501
2.7.2		4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD	1	dokumen	170.325.000	1	dokumen	170.325.000
2.7.3		4.02.02.2.08.03 Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Jumlah rapat banmus yang difasilitasi	12	kali	44.100.000	12	kali	44.075.000
2.7.4		4.02.02.2.08.04 Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah fasilitasi tugas pimpinan DPRD	12	kegiatan	509.741.000	11	kegiatan	414.165.410
Jumlah Anggaran dan Realisasi Program						57.102.944.828			55.111.956.764
Rata-rata Capaian Kinerja (%)							95,21		96,51
Predikat Kinerja							Sangat Tinggi		Sangat Tinggi

Dilihat dari tabel di atas bahwa Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk di tahun 2022 memiliki 2 (dua) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 60 (enam puluh) Sub Kegiatan. Kalau di lihat dari masing-masing capaian kinerja untuk serapan sudah baik sehingga perlu dipertahankan dan dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Adapun faktor pendorong keberhasilan yaitu adanya Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Pontianak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)					(2)		(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)=(7/6)	(9)		(10)=(5+7+9)		(11)=(10/4)
Tujuan :Meningkatnya Kualitas Layanan Publik					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Sangat Baik														
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Layanan					1. Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD		Sangat Baik														
					2. Indeks Kepuasan Masyarakat																Sangat Baik
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																					
SEKRETARIAT DPRD																					
4					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KO TA		Tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	95 %		0 %		- %		- %				- %			
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %		- dokumen		- dokumen		- dokumen				- dokumen/L aporan		- dokumen/lap oran	

(1)					(2)		(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)=(7/6)	(9)		(10)=(5+7+9)		(11)=(10/4)
4	02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	-	-	dokumen	-	dokumen
4	02	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan		dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	-		laporan		laporan
4	02	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8	Laporan		dokumen		dokumen		dokumen				laporan		laporan
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%		bulan		bulan		bulan			26	dokumen/laporan		dokumen/laporan
4	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	Orang/bulan		bulan		bulan		bulan			37	orang/bulan		orang/bulan
4	02	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	dokumen		bulan		bulan		bulan			12	dokumen		dokumen

(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)=(7/6)	(9)		(10)=(5+7+9)		(11)=(10/4)
4	02	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		dokumen		dokumen		dokumen		2	laporan		laporan	
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	%		unit		unit		unit		1	dokumen		dokumen	
4	02	01	2.03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	dokumen		unit		unit		unit		1	dokumen		dokumen	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	%		orang		orang		orang		37	orang		orang	
4	02	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	9	Paket		stel		stel		stel		3	paket		paket	
4	02	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	orang		orang		orang		orang		4	orang		orang	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%		bulan		bulan		bulan		12	paket/dokumen/laporan		paket/dokumen/laporan	

(1)					(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)		(8)=(7/6)	(9)		(10)=(5+7+9)		(11)=(10/4)
4	02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	Paket		bulan		bulan		12	paket		paket	
4	02	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	108	Paket		bulan		bulan		12	paket		paket	
4	02	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36	Paket		bulan		bulan		12	paket		paket	
4	02	01	2.06	04		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	Paket		bulan		bulan		12	paket		paket	
4	02	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	Paket		bulan		bulan		12	paket		paket	
4	02	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	216	Dokumen		bulan		bulan		12	dokumen		dokumen	
4	02	01	2.06	08		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	108	Laporan		orang		orang		2.180	laporan		laporan	
4	02	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan		bulan		bulan		12	laporan		laporan	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%		unit		unit		80	unit		unit	
4	02	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	unit		unit		unit		9	unit		unit	
4	02	01	2.07	11		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60	unit		unit		unit		93	unit		unit	

(1)					(2)		(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)=(7/6)	(9)		(10)=(5+7+9)		(11)=(10/4)
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%		bulan		bulan		bulan		156	laporan		laporan	
4	02	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288	Laporan		bulan		bulan		bulan		12	laporan		laporan	
4	02	01	2.08	03		Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Laporan		bulan		bulan		bulan		12	laporan		laporan	
4	02	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	144	Laporan		bulan		bulan		bulan		12	laporan		laporan	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100	%		unit		unit		unit		277	unit		unit	
4	02	01	2.09	01		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	unit		unit		unit		unit		5	unit		unit	
4	02	01	2.09	02		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	unit		unit		unit		unit		3	unit		unit	
4	02	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	unit		unit		unit		unit		30	unit		unit	
4	02	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	178	unit		unit		unit		unit		237	unit		unit	

(1)					(2)		(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)=(7/6)	(9)		(10)=(5+7+9)		(11)=(10/4)		
4	02	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	unit		unit		unit		unit	2	unit		unit		
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		persentase capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	%		bulan		bulan		bulan		45	orang/bulan		orang/bulan	
4	02	01	2.15	01		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45	orang/bulan		bulan		bulan		bulan		45	orang/bulan		orang/bulan	
4	02	01	2.15	02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	12	Paket		stel		stel		stel		3	paket		paket	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD		Jumlah paket layanan administrasi DPRD	108	Paket		bulan		bulan		bulan		12	paket		paket	
4	02	01	2.16	04		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	108	Paket		bulan		bulan		bulan		12	paket		paket	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100	%		%		%		%		100	%		%	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD	78	dokumen		%		%		%		100	%		%	

(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)=(7/6)	(9)		(10)=(5+7+9)		(11)=(10/4)
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3	dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		1	dokumen		dokumen	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	36	dokumen		raperda		raperda		raperda		10	dokumen		dokumen	
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	30	dokumen		raperda		raperda		raperda		5	dokumen		dokumen	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan /atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6	dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		2	dokumen		dokumen	
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	3	dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		1	dokumen		dokumen	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pembahasan kebijakan anggaran	21	dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		5	dokumen		dokumen	
4	02	02	2.02	01	pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	3	dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		1	dokumen		dokumen	
4	02	02	2.02	02	pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3	dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		1	dokumen		dokumen	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6	dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		1	dokumen		dokumen	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	6	dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		1	dokumen		dokumen	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3	dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		1	dokumen		dokumen	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100	%		%		%		%		100	%		%	

(1)					(2)		(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)=(7/6)	(9)		(10)=(5+7+9)		(11)=(10/4)	
4	02	02	2.03	01		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	180	Laporan		kali		kali		kali			60	laporan		laporan	
4	02	02	2.03	02		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	180	Laporan		kali		kali		kali			60	laporan		laporan	
4	02	02	2.03	03		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	180	Laporan		kali		kali		kali			60	laporan		laporan	
4	02	02	2.03	04		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	180	Laporan		kali		kali		kali			60	laporan		laporan	
4	02	02	2.03	06		Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3	dokumen		kali		kali		kali			1	dokumen		dokumen	
4	02	02	2.03	08		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3	dokumn		kali		kali		kali			10	dokumen		dokumen	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas DPRD	100	%		%		%		%			100	dokumen		dokumen	
4	02	02	2.04	02		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	18	dokumen		kegiatan		kegiatan		kegiatan			6	dokumen		dokumen	
4	02	02	2.04			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	78	dokumen		bulan		bulan		bulan			12	dokumen		dokumen	

(1)					(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)=(7/6)	(9)		(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
4	02	02	2.04			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	orang		orang		orang		orang			7	orang		orang
4	02	02	2.04			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	3	dokumen		dokumen		dokumen		dokumen			1	dokumen		dokumen
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	540	dokumen		%		%		%			100	%		%
4	02	02	2.05	02		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	135	dokumen		dokumen		dokumen		dokumen			1	dokumen		dokumen
4	02	02	2.05	03		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	405	dokumen		kegiatan		kegiatan		kegiatan			3	dokumen		dokumen
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100	%		%		%		%			100	%		%
4	02	02	2.06	01		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	6	dokumen		dokumen		dokumen		dokumen			1	dokumen		dokumen
4	02	02	2.06	02		Pengawasan kode etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3	Laporan		kali		kali		kali			6	laporan		laporan
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD	100	%		%		%		%			100	%		%
4	02	02	2.08	01		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	120	dokumen		kegiatan		kegiatan		kegiatan			12	dokumen		dokumen
4	02	02	2.08	02		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	459	Laporan		dokumen		dokumen		dokumen			1	laporan		laporan
4	02	02	2.08	03		Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	36	dokumen		kali		kali		kali			12	dokumen		dokumen
4	02	02	2.08	04		Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	42	dokumen		kegiatan		kegiatan		kegiatan			20	dokumen		dokumen

Di lihat dari tabel di atas bahwa Penyusunan renja 2024 merupakan tahun pertama pada periodisasi renstra 2024-2026 sehingga belum ada realisasi kinerja yang dapat diukur.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dengan tugas pokoknya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun pelayanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD tidaklah berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Tidak ada standar pelayanan minimal tertentu yang wajib dipenuhi oleh Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Meskipun demikian, Sekretariat DPRD mempunyai peranan yang sangat penting dan turut menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD; artinya bahwa efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD akan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas DPRD maka Sekretariat DPRD harus dapat berperan secara maksimal, dan untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Pontianak

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator sasaran												
1.	Indeks Kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD			Baik	91,26	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat					Sanagat Baik				Sangat Baik		
Indikator Program												
1.	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi					100 %				100%		
2	Tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan kesekretariatan			100%	100%	Sangat Baik		92,11%		95%		

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang DPRD .

Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD diperlukan Peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
- b) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD
- c) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan penyajian informasi.
- d) Kualitas tenaga ahli dalam penyusunan / perancangan peraturan daerah, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD

IDENTIFIKASI FAKTOR STRATEGI

Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan tahunan ke depan Renja Sekretariat DPRD Kota Pontianak, dengan menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

A. Identifikasi Faktor Strategi Eksternal

1. Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain :

- a) Ketersediaan anggaran yang cukup memadai sehingga memungkinkan bagi organisasi untuk terus berinovasi dalam penyusunan program dan kegiatan guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- b) Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan pengembangan SDM.
- c) Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka menunjang kinerja DPRD
- d) Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuka peluang pengembangan aplikasi teknologi informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- e) Adanya forum Asosiasi Sekretariat DPRD Kab/ Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) sebagai wadah bertukar informasi antar Sekretariat DPRD seluruh Indonesia.

2. Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain :

- a) Peraturan perundang-undangan sebagai instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sering mengalami perubahan dan tidak dapat diprediksi.

B. Identifikasi Faktor Strategi Internal

1. Kekuatan yang bisa digunakan, antara lain :

- a) Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.
- b) Ketersediaan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas yang cukup memadai.

2. Kendala/kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain :

- a) Kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum memadai sehingga pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan pun dirasa belum optimal
- b) Manajemen pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan penyebarluasan data dan informasi kedewanan yang belum terkelola dengan baik dan professional, sehingga belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat kota Pontianak.
- c) Struktur organisasi belum mengacu pada Permendagri 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota
- d) Tingginya intensitas kegiatan DPRD yang menyebabkan tuntutan pelayanan yang semakin meningkat

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman diperoleh strategi alternative sebagai berikut :

- 1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- 2. Strategi menanggulangi kendala / kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
- 3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan /ancaman;
- 4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis sederhana, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada, namun pengaruh kelemahan maupun ancaman perlu di perhatikan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan tidak mengalami perubahan dikarenakan dalam penyusunan sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Pontianak guna mendukung target dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Pontianak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		42.025.239.162	PRO GRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		42.932.729.162	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		27.884.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		27.884.800	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	9.692.400		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	9.692.400	

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.641.600		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.641.600	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	8.550.800		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	8.550.800	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah		5.326.439.300	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah		5.326.439.300	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4.866.527.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4.866.527.000	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	457.190.000		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	457.190.000	

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2.722.300		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2.722.300	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		37.152.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		37.152.000	
1.3.1		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	37.152.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	37.152.000	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		106.944.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		106.944.000	

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	48.560.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	48.560.000	
1.4.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	58.384.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	58.384.000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		2.563.763.034	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		2.943.513.034	
1.5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	73.075.240		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	24 Paket	73.075.240	
1.5.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	243.318.900		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	243.318.900	
1.5.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	121.768.100		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	121.768.100	

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.5.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	121.768.100		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	121.768.100	
1.5.4		Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	945.381.044		Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	1.284.381.044	
1.5.6		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	181.358.750		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	222.108.750	
1.5.7		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	76.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	76.000.000	
1.5.8		Fasilitasi kunjungan tamu	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	445.360.000		Fasilitasi kunjungan tamu	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	445.360.000	
1.5.9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	477.501.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	477.501.000	

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		305.964.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		305.964.900	
1.6.1		Pengadaan Mebel	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	112.433.700		Pengadaan Mebel	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	112.433.700	
1.6.2		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	193.531.200		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	193.531.200	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		2.666.297.272	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		2.725.047.272	
1.7.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan	470.101.272		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan	470.101.272	

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.7.2		Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	327.206.000		Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	327.206.000	
1.7.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	1.868.990.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	1.972.740.000	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah		1.028.271.356	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah		1.028.271.356	
1.8.1		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	193.750.000		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	193.750.000	
1.8.2		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	64.970.000		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	64.970.000	

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.8.3		Pemeliharaan Mebel	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	30.000.000		Pemeliharaan Mebel	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	30.000.000	
1.8.4		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	178 Unit	251.150.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	178 Unit	251.150.000	
1.8.5		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	488.401.356		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	488.401.356	
1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			persentase capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		29.420.110.000	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			persentase capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		29.844.100.000	
1.9.1		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/bulan	28.758.120.000		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/bulan	29.182.110.000	
1.9.2		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	661.990.000		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	661.990.000	

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.10	Layanan Administrasi DPRD			Jumlah paket layanan administrasi DPRD		542.412.500	Layanan Administrasi DPRD			Jumlah paket layanan administrasi DPRD		542.412.500	
1.10.1		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 Paket	542.412.500		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 Paket	542.412.500	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi		13.768.697.838	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi		14.033.995.833	
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD		540.298.300	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD		540.298.300	
2.1.1		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	2.385.900		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	2.385.900	
2.1.2		Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	206.919.100		Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	206.919.100	

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1.3		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	75.980.000		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	75.980.000	
2.1.4		Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan Naskah Akademik	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	251.051.000		Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan /atau Naskah Akademik	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	251.051.000	
2.1.5		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	3.962.300		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	3.962.300	
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran			jumlah dokumen hasil pembahasan kebijakan anggaran		225.920.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran			jumlah dokumen hasil pembahasan kebijakan anggaran		225.920.000	
2.2.1		pembahasan KUA dan PPAS	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	3.925.000		pembahasan KUA dan PPAS	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	3.925.000	
2.2.2		pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	3.925.000		pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	3.925.000	

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.2.3		Pembahasan APBD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	210.020.000		Pembahasan APBD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	210.020.000	
2.2.4		Pembahasan APBD Perubahan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	4.025.000		Pembahasan APBD Perubahan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	4.025.000	
2.2.5		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	4.025.000		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	4.025.000	
2.3	Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan			Persentase pelaksanaan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		72.679.700	Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan			Persentase pelaksanaan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		72.679.700	
2.3.1		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60 Laporan	15.490.000		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60 Laporan	15.490.000	
2.3.2		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60 Laporan	15.490.000		Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60 Laporan	15.490.000	

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.3.3		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 Laporan	15.490.000		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 Laporan	15.490.000	
2.3.4		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60 Laporan	13.470.000		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60 Laporan	13.470.000	
2.3.5		Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	3.365.000		Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	3.365.000	
2.3.6		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Laporan	9.374.700		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Laporan	9.374.700	

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD			Persentase pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas DPRD		3.609.307.005	Peningkatan Kapasitas DPRD			Persentase pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas DPRD		3.874.605.000	
2.4.1		Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.653.937.005		Bimbingan Teknis DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.829.235.000	
2.4.2		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	26 Dokumen	649.300.000		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	26 Dokumen	739.300.000	
2.4.3		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	294.300.000		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	294.300.000	
2.4.4		Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	11.770.000		Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	11.770.000	
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			Jumlah Dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		4.181.095.333	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			Jumlah Dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		4.181.095.333	

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.5.1		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	semua kabupaten/Kota, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	45 Dokumen	3.320.000		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	semua kabupaten/Kota, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	45 Dokumen	3.320.000	
2.5.2		Pelaksanaan Reses	semua kabupaten/Kota, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	135 Dokumen	4.177.775.333		Pelaksanaan Reses	semua kabupaten/Kota, semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	135 Dokumen	4.177.775.333	
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD		13.273.200	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD		13.273.200	
2.6.1		Penyusunan Kode Etik DPRD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	3.763.100		Penyusunan Kode Etik DPRD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	3.763.100	
2.6.2		Pengawasan kode etik DPRD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	9.510.100		Pengawasan kode etik DPRD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	9.510.100	
2.7	Fasilitasi Tugas DPRD			Persentase pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD		5.126.124.300	Fasilitasi Tugas DPRD			Persentase pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD		5.126.124.300	

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.7.1		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	40 Dokumen	3.850.068.000		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	40 Dokumen	3.850.068.000	
2.7.2		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	153 Laporan	142.665.000		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	153 Laporan	142.665.000	
2.7.3		Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	173.477.300		Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	173.477.300	
2.7.4		Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	14 Dokumen	959.914.000		Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	14 Dokumen	959.914.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD dituntut untuk mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Melalui pelaksanaan trifungsi DPRD (Pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran dan Pengawasan), diharapkan mampu mengawal jalannya roda pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan demi mewujudkan visi dan misi Walikota yang telah ditetapkan.

Setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD nantinya akan diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran, sedangkan penyelenggaraan program dan kegiatan masyarakat akan ditampung, direncanakan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD. Pada forum Perangkat Daerah tidak terdapat usulan program/ kegiatan yang ditujukan kepada Sekretariat DPRD, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan Sekretariat DPRD bukanlah perangkat daerah teknis, melainkan hanya sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan yang hanya menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Pontianak

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan aspek pelayanan umum pada bidang pelayanan unsur pendukung urusan pemerintahan, Sekretariat DPRD ikut mendukung terlaksananya tujuan 3 (tiga) pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak yaitu : “Meningkatkan Tata kelola Kepemerintahan yang Baik”.

Jika dikaitkan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang biasa disebut SDGs (Sustainable Development Goals) yang terdiri dari 17 tujuan global, 94 Sasaran Global dan 230 Sasaran Nasional, maka sekretariat DPRD terkait dengan :

1. a. Tujuan global XVI yaitu : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- b. Sasaran global XVI.5 yaitu : Memperkuat Lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat
- c. Sasaran nasional XVI.5.5 yaitu : Meningkatnya persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian 100%, Lembaga 100%, Provinsi 100%, Kabupaten/ Kota 80% pada Tahun 2019

Namun jika dikaitkan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang terdiri dari 10 tema pembangunan, maka sekretariat DPRD terkait dengan tema 8 yaitu “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”. Sebagaimana Tujuan Sekretariat DPRD Yaitu “Meningkatnya kualitas layanan publik”, serta sasaran yang lebih spesifik yaitu “ Meningkatkan kualitas layanan”.

Dengan tersedianya layanan yang berkualitas diharapkan Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai lembaga Legislatif secara maksimal serta bersinergi dengan Pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

RPJMD Kota Pontianak 2020 – 2024 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kota Pontianak semestinya sampai dengan Tahun 2024, namun demikian dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Walikota Pontianak yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir Tahun 2023 diamamatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026 sebagaimana tersebut di atas dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2024-2026, maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun.

Adapun tujuan Renja Sekretariat DPRD tahun 2024 adalah :

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Layanan

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian kegiatan utama yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk satu tahun kedepan meliputi program, kegiatan, yang akan dilaksanakan. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Renstra Sekretariat DPRD dan RPD Kota Pontianak tahun 2024-2026.

Tabel 3.1
Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD Kota Pontianak

No	Uraian	Jumlah
1.	Program	2 (dua)
2.	Kegiatan	17 (tujuh belas)
3.	Sub Kegiatan	58 (lima puluh delapan)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan berisi program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, hasil program dan target, masukan kegiatan dan target, keluaran kegiatan dan target, hasil kegiatan dan target, serta pagu indikatif tahun anggaran 2024, sebagai cara untuk melaksanakan dan mengukur capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kebijakan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak diselaraskan dengan perkembangan Kota Pontianak secara umum. Sedangkan kinerja yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan terhadap pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan) merupakan prioritas kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Secara rinci Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK TAHUN 2024																
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						55.793.937.000,00							55.728.953.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						55.793.937.000,00							55.728.953.000,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						55.793.937.000,00							55.728.953.000,00	
1,	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Keseekretariata n	-			95 Persen	42.025.239.162,00						-	41.492.255.162,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	27.884.800,00			-	Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	-	27.884.800,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.692.400,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		9.692.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	9.641.600,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		9.641.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	8.550.800,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		8.550.800,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	5.326.439.300,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	-	5.261.455.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	4.866.527.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		4.801.543.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	457.190.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		457.190.000,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	2.722.300,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		2.722.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	-			100 Persen	37.152.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	-	37.152.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	37.152.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		37.152.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			100 Persen	106.944.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	-	106.944.000,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				3 Paket	48.560.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		48.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				4 Orang	58.384.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		58.384.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah</i>	-			100 Persen	2.563.763.034,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	-	2.563.763.034,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				24 Paket	73.075.240,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		73.075.240,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				36 Paket	243.318.900,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		243.318.900,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	121.768.100,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		121.768.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	945.381.044,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		945.381.044,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	181.358.750,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		181.358.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				72 Dokumen	76.000.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		76.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				36 Laporan	445.360.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		445.360.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	477.501.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		477.501.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	305.964.900,00			-	Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	-	305.964.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	112.433.700,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		112.433.700,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	193.531.200,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		193.531.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	2.666.297.272,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	-	2.666.297.272,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				96 Laporan	470.101.272,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		470.101.272,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	327.206.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		327.206.000,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	1.868.990.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		1.868.990.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	1.028.271.356,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	-	1.028.271.356,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	193.750.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		193.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	64.970.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		64.970.000,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	30.000.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				178 Unit	251.150.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		251.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	488.401.356,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		488.401.356,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	persentase capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-			100 Persen	29.420.110.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	-	28.952.110.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	28.758.120.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		28.758.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>				4 Paket	661.990.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		193.990.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	<i>Jumlah paket layanan administrasi DPRD</i>	-			36 Paket	542.412.500,00			-	Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	-	542.412.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan</i>				36 Paket	542.412.500,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		542.412.500,00	SEKRETARIAT DPRD
2,	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi</i>	-			100 persen	13.768.697.838,00						-	14.236.697.838,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<i>jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD</i>	-			26 Dokumen	540.298.300,00			-	Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	-	540.298.300,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	2.385.900,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		2.385.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				12 Dokumen	206.919.100,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		206.919.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				10 Dokumen	75.980.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		75.980.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	251.051.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		251.051.000,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	3.962.300,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatk an Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		3.962.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	jumlah dokumen hasil pembahasan kebijakan anggaran	-			7 Dokumen	225.920.000,00			-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	-	225.920.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	3.925.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		3.925.000,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	3.925.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		3.925.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	210.020.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		210.020.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				2 Dokumen	4.025.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		4.025.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	4.025.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		4.025.000,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	-			100 Persen	72.679.700,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	-	72.679.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				60 Laporan	15.490.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		15.490.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				60 Laporan	15.490.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		15.490.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				60 Laporan	15.490.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		15.490.000,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				60 Laporan	13.470.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		13.470.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	3.365.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		3.365.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	9.374.700,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		9.374.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas DPRD	-			100 Persen	3.609.307.005,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	-	1.990.939.338,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	2.653.937.005,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		1.035.569.338,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	294.300.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		294.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	11.770.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		11.770.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				26 Dokumen	649.300.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		649.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	-			180 Dokumen	4.181.095.333,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	-	6.267.463.000,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				45 Dokumen	3.320.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		3.320.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				135 Dokumen	4.177.775.333,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		6.264.143.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	-			100 Persen	13.273.200,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	-	13.273.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				2 Dokumen	3.763.100,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		3.763.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	9.510.100,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		9.510.100,00	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD	-			100 Persen	5.126.124.300,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-	-	5.126.124.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				40 Dokumen	3.850.068.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		3.850.068.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				153 Laporan	142.665.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		142.665.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	173.477.300,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		173.477.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				14 Dokumen	959.914.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	-		959.914.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H							55.793.937.000,00								55.728.953.000,00

BAB V
PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan mengacu pada Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 serta Surat Edaran Wali Kota Pontianak nomor 050/10/BAPPEDA tahun 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Rencana kerja ini dimaksudkan sebagai penggambaran proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari seluruh Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026 secara umum. Dokumen ini memuat Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan.

Demikian Renja Sekretariat DPRD Kota Pontianak disusun untuk menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Pontianak, Agustus 2023

 **Salin** Sekretaris DPRD Kota Pontianak
SEKRETARIAT
TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631207 198803 2 001